BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik agraria yang berlangsung antara masyarakat petani pejuang di *Nagari* Kapa dengan PT PHP I. PT Permata Hijau Pasaman (PHP) I merupakan anak perusahaan Wilmar Grup, yang berlokasi di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Luhak Nan Duo, *Nagari* Kapa. Konflik ini menggambarkan ketegangan dari perbedaan kepentingan atas tanah ulayat yang telah berlangsung sejak 1980-an hingga saat ini. Konflik ini menyoroti bahwa akar persoalan bukan semata-mata terkait kepemilikan dan penguasaan tanah, melainkan mencakup sosial ekonomi, hingga budaya dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal.

Nagari Kapa merupakan sebuah wilayah dengan geografis dan demografis yang khas serta strategis. Terletak di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, *Nagari* Kapa menempati wilayah seluas $\pm 41,94$ km² dan terdiri dari enam wilayah kejurongan. Secara topografis, *Nagari* Kapa tergolong dataran rendah yang mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan sebagai penghidupan utamanya. Secara administratif, *Nagari* Kapa memiliki batas-batas adat yang masih diakui oleh masyarakat setempat, mencerminkan kuatnya identitas lokal sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. *Nagari* kapa juga memiliki potensi geografis, seperti lahan pertanian dan perkebunan yang luas serta akses yang relatif baik, menempatkan *Nagari* Kapa dalam posisi strategis untuk pengembangan ekonomi

lokal berbasis sumber daya alam.

Pada bagian kesimpulan ini penulis akan merangkum terkait dengan tujuan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun tujuan peneliti yang peneliti ajukan yaitu:

1) Bagaimana pola okupasi lahan yang dilakukan oleh masyarakat petani di *Nagari* Kapa sebagai bentuk perlawanan kepada PT. PHP (Permata Hijau Pasaman) I dan pemerintah, dan 2) Faktor budaya seperti apa yang mendasari bentuk perlawanan masyarakat petani di *Nagari* Kapa kepada PT. PHP (Permata Hijau Pasaman) I dan pemerintah.

Terkait dengan tujuan penelitian pertama, peneliti menemukan bahwa struktur sosial ekonomi masyarakat petani pejuang *Nagari* Kapa ditandai oleh ketimpangan kepemilikan lahan dan ketergantungan terhadap pemanfaatan tanah ulayat. Mayoritas petani tergolong ke dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Disebabkan tidak memiliki lahan pribadi dan menggantungkan hidup dari okupasi lahan HGU milik PT PHP 1.

Kondisi ini melahirkan kelompok tani berbasis perjuangan. Sebanyak 303 orang tergabung dalam 10 kelompok tani, yang sebagian besar kelompok ini didukung oleh Serikat Petani Indonesia (SPI). Kehadiran kelompok tani ini menjadi wadah perjuangan dan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan penguasaan lahan. Konflik yang terjadi antara masyarakat petani *Nagari* Kapa dan PT PHP, berakar dari penyerahan tanah ulayat kepada negara tanpa keputusan penuh dari seluruh kelompok *ninik mamak*. Tanah seluas 1.600 ha yang diserahkan pada tahun 1997 menjadi dasar terbitnya HGU kepada PT PHP I pada tahun 2004. Proses penyerahan ini menimbulkan perlawanan dari kelompok adat yang tidak dilibatkan,

terutama *Ninik Mamak Langgam*. Sehingga masyarakat mulai melakukan okupasi atas lahan HGU sejak awal tahun 2000-an.

Konflik ini terus mengalami eskalasi mulai dari okupasi lahan, demonstrasi, hingga masyarakat petani mengalami bentrok dengan aparat kepolisian. Titik balik pada tahun 2019, ketika *Gampo Alam* (Pucuk Adat) secara terbuka menyatakan bahwa masa HGU perusahaan telah berakhir. Seruan ini mendorong masyarakat untuk mengokupasi lahan secara masif. Sejak tahun 2020, lahan HGU diokupasi secara kolektif, terutama dengan menanam jagung sebagai bentuk legitimasi atas tanah yang dianggap sebagai hak ulayat. Adanya fase okupasi yang dilakukan oleh masyarakat petani pejuang secara berulang sehingga membentuk sebuah pola.

Kegagalan petani pejuang *Nagari Kapa* dalam mempertahankan okupasi tidak terjadi begitu saja, tetapi adanya intervensi dari negara dan perusahaan. Faktor utama kegagalan okupasi adalah adanya kriminalisasi yang terstruktur dan sistematis terhadap masyarakat petani pejuang. Penangkapan *Gampo Alam* dan rekan-rekan menjadi pukulan telak. Mereka terjebak dengan dalih mediasi, lalu diproses hukum atas tuduhan mengganggu usaha perkebunan sah. proses ini minim transparansi dan tidak adanya pendampingan hukum, sehingga vonis dijatuhkan hanya berdasarkan dokumen HGU perusahaan.

Setelah peristiwa tersebut, konflik kembali memanas pada tanggal 7 Oktober 2024, yang berujung bentrok aparat kepolisian dengan masyarakat petani. Kejadian ini menimbulkan kerugian besar dari masyarakat petani pejuang, hingga penangkapan beberapa petani atas dasar melawan hukum negara. Perjuangan

masyarakat petani pejuang tidak berhenti begitu saja. Setelah digusurnya petani dari lahan, bersama LBH Padang mereka melakukan kegiatan pertanian hidroponik melon. Bersama dalam memperkuat solidaritas, kelompok petani membangun usaha pertanian hidroponik sebagai sumber penghidupan sementara, menjelang HGU perusahaan habis.

Kemudian terkait dengan tujuan penelitian kedua, peneliti menemukan bahwa perlawanan petani di *Nagari* Kapa terhadap PT PHP I tidak semata-mata digerakkan oleh kepentingan sosial ekonomi, melainkan juga pada nilai-nilai budaya Minangkabau yang hidup dan dijalankan secara kolektif. Sistem kekerabatan matrilineal, kepemilikan tanah ulayat yang bersifat komunal, serta posisi *ninik mamak* sebagai pemegang otoritas adat menjadi fondasi kuat dari solidaritas petani.

Identitas sebagai anak kemenakan dan keberadaan dalam struktur adat menjadikan tanah ulayat bukan sekedar lahan semata, melainkan simbol budaya yang diwariskan turun-temurun. Adanya anggota kelompok petani pejuang ini menunjukkan bahwa ikatan perjuangan tumbuh dari nilai kebersamaan dan tujuan yang sama. Perlawanan ini juga didasari oleh keretakan dalam mekanisme adat itu sendiri. Keretakan itu dapat dilihat pada prinsip musyawarah untuk mufakat terabaikan dalam proses penyerahan tanah ulayat kepada pemerintah. Keputusan tersebut melemahkan legitimasi adat dan menimbulkan fragmentasi internal masyarakat adat. Akibatnya perlawanan petani menjadi bentuk koreksi terhadap rusaknya tatanan nilai dan representasi adat. Budaya dalam konteks ini bukan hanya memberi arah perjuangan, tetapi juga menjadi sumber daya moral dalam

mempertahankan hak, identitas, dan kedaulatan kolektif masyarakat adat *Nagari* Kapa.

B. Saran

Berangkat dari hasil penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan bisa menjadi masukan bagi berbagai pihak antara lain:

1. Saran peneliti untuk Pemerintah *Nagari* Kapa, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah perlu mengambil langkah dalam mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan, khususnya bagi petani yang tidak memiliki tanah. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah melalui program landreform, yang meskipun tidak dapat langsung menggunakan lahan HGU, tetapi memungkinkan pemanfaatan tanah negara atau tanah terlantar untuk dialokasikan kepada petani. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pendampingan hukum dan pemberdayaan masyarakat petani. Kajian hukum dan kebijakan agraria lokal juga penting dilakukan guna menciptakan regulasi yang lebih baik untuk masyarakat petani.
2. Saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya terkait dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti topik atau tema penelitian yang sama khususnya dalam bidang ilmu Antropologi. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dalam berbagai sudut pandang dalam bidang ilmu lainnya.